

**IMPLEMENTASI PASAL 37 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS  
MEMBERIKAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN SECARA  
CUMA-CUMA (STUDI KASUS NOTARIS DI KABUPATEN BULELENG)**

**Oleh**

**Kadek Arya Aditya, NIM 1614101040**

**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) implementasi pemberian jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu oleh Notaris di Kabupaten Buleleng (2) faktor penghambat dalam pemberian jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian yaitu di 7 (tujuh) kantor Notaris yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* untuk teknik analisis pengolahan dan analisis data menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu sudah berjalan dan penerapannya sudah ada di Kabupaten Buleleng. Namun belum maksimal atau angka yang sangat kecil di bandingkan dengan akta biasa, faktor penghambat pemberian jasa hukum bidang kenotariatan yaitu adanya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pemberian jasa hukum bidang kenotariatan yang tidak membedakan orang mampu dan orang tidak mampu, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jasa hukum bidang kenotariatan yang di berikan secara cuma-cuma oleh Notaris dan Efektivitas implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma ini masih memerlukan regulasi baru di bidang kenotariatan, khususnya mengenai kualifikasi orang yang tidak mampu, dan jenis jasa hukum bidang kenotariatan yang dapat diberikan secara cuma-cuma.

Kata kunci : Honorarium, Jasa Hukum, Notaris

**THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 37 (1) OF LAW NUMBER 2  
THE YEAR 2014 ON NOTARY POSITION PERTAINING TO THE  
NOTARY'S OBLIGATION TO GIVE FREE LEGAL SERVICES IN  
NOTARY LEGAL ( CASE STUDY IN NOTARY'S BULELENG  
REGENCY)**

**By**

**Kadek Arya Aditya, NIM 1614101040**

**Law Science Department**

**Abstract**

This study aimed at finding out : (1) the implementation of the giving of free legal services in the notary's field to the poor in Buleleng Regency (2) factors that hinder in the giving of free legal services in the notary legal field to the poor in Buleleng Regency. This study is a juridical empirical research, research approach using the statute approach and case approach. The study took place in 7 (seven) notary offices in Buleleng regency jurisdiction. The data were collected using document study, observation, and interview techniques. The determination of sample was done using a purposive sampling technique. This study shows that the giving of free notary legal services to the poor has been implemented in Buleleng regency. However, it has not yet been optimal or the number is very small compared to that of ordinary documents issued, the factors that hindered the giving of the legal services in the notary field has been the cost in non-tax (PNBP) revenue in giving free legal services in the notary field which does not differentiate between the rich and the poor; inadequate knowledge of the people about free legal assistance in the notary field given by notaries and the effectiveness of the implementation of the giving of free legal services still needs a new regulation in the notary field, especially on the qualification of the poor, and the type of legal service in the notary field that can be given freely.

**Keywords:** Honorarium, Legal Services, Notary.